

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PILOT PROJECT PEMBANGUNAN DESA PARTISIPATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DEREK BAKARBESSY

Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon
derekbakarbessukim@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze community participation in the Pilot Project for Participatory Village Development in Southeast Maluku Regency. The results showed that community participation in the Pilot Project for Participatory Village Development in Southeast Maluku Regency can be said to be high and mobilized, although there are also some villages that show genuine participation. In relation to the government's position as a stimulator of development, the community will actively participate in a development program in accordance with the level of their needs, so that the program is carried out according to the wishes and needs of the community itself. The integrated role between the Government and social institutions will increase community participation in participatory development programs.

Keywords: community participation, participatory development

PENDAHULUAN

Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan perdesaan, karena bagian pedesaan maka titik tumpu pembangunan tidak terbesar masyarakat Indonesia berada di bisa lain kecuali pada pembangunan desa dengan segala aspeknya. Keadaan yang demikian ini diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat perdesaan masih diliputi dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial lainnya. Perlu usaha yang terencana untuk membangun prasarana perhubungan desa, produksi, pemasaran dan prasarana desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan kebijakan penataan kelembagaan pada pemerintahan desa. Dengan menjadikan pemerintah desa sebagai bagian langsung dari birokrasi negara yang melaksanakan tugas yang dibebankan oleh negara di wilayahnya (Suyanto dalam Rauf, 1993:141).

Konsep otonomi desa yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kedudukan yang kuat bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi riil masyarakat desa yang bersangkutan, termasuk di dalamnya dalam menentukan program-program pembangunan. Disinilah peluang untuk diterapkannya bottom up planning dengan mengedepankan peran serta masyarakat (masyarakat partisipatif). Pemerintah dalam hal ini Bupati selaku Administrator Pemerintahan Pembangunan daerah dan kemasyarakatan bertanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah perdesaan guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Program pengentasan kemiskinan dikembangkan dengan memadukan berbagai aspirasi yang berkembang di

masyarakat sesuai dengan arah kebijakan nasional. Mekanisme penyusunan program dari perencanaan yang dimulai dari tingkat desa dan dimusyawarahkan di dalam Musbangdes upaya itu dilanjutkan dengan temu karya pembangunan kecamatan dan ke Rakorbang II, yang kemudian ditetapkan di dalam APBD dengan skala prioritas tertentu, bahwa program pembangunan yang secara langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan menjadi prioritas utama.

Salah satu program pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini adalah Pilot Project Pembangunan Desa Partisipatif berupa bantuan pelaksanaan pembangunan partisipatif, menjadi rujukan utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang ditandai oleh besarnya rasa memiliki dan tanggung jawab. Program bantuan pelaksanaan pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang tertumpu kepada masyarakat dengan melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan perkembangannya. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan karena masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku, dan adat istiadat serta kebiasaan di lingkungannya.

Partisipasi masyarakat merupakan isu yang cukup urgen sehingga memerlukan perhatian yang besar dalam kaitannya dengan proses pembangunan, karena partisipasi timbul dalam konteks penyelenggaraan pembangunan yaitu agar masyarakat mengambil peranan di dalamnya secara aktif dalam proses perubahan dan pembangunan berencana.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan, pelaksanaan dan evaluasi berbagai bentuk kebijakan publik di daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, terbuka, bebas KKN dan berkeadilan. Obyek dari partisipasi masyarakat adalah segala bentuk kebijakan yang dibuat dan diterapkan di daerah. Program bantuan pelaksanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu wujud pendekatan pembangunan partisipatif yang menempatkan semua pelaku pembangunan, termasuk kesetaraan gender sehingga masyarakat menjadi subyek dan pelaku utama dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan. Penelitian ini berusaha untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengambil peran serta pada implementasi Pilot Project Pembangunan Desa Partisipatif di Kabupaten Maluku Tenggara.

Tinjauan Pustaka

Subyek partisipasi adalah seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Masyarakat yang dimaksud adalah penduduk yang berdomisili di suatu wilayah baik secara individual, maupun secara organisatoris yang terkena dampak kebijakan publik secara langsung maupun tidak langsung. Subyek partisipasi ini bisa juga berasal dari perwakilan dari stakeholder kota dan individu yang ada hubungannya dengan kebijakan terkait. Lobis (1996) menyatakan bahwa pada dasarnya partisipasi masyarakat di tingkat daerah didasarkan pada :

- a. Adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat
- b. Masyarakat daerah adalah merupakan bagian dari subyek penentu kebijakan daerah.
- c. Adanya sinergitas antara masyarakat, legislatif dan eksekutif sebagai penentu kebijakan daerah
- d. Berangkat dari pemikiran untuk mewujudkan kepentingan bersama secara adil di tingkat daerah.
- e. Adanya kesetaraan dan kepercayaan bersama antara masyarakat legislatif dan eksekutif.
- f. Prakarsa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat merupakan hak
- g. Legal dan sama kedudukannya dengan inisiatif yang datang dari pemerintah daerah.

Pengertian mekanisme partisipasi adalah metode atau tata cara untuk mengatur keterpaduan proses penentuan kebijakan publik atas dasar kerjasama kesetaraan yang terbangun antara legislatif-eksekutif dan masyarakat. Kerangka partisipasi masyarakat di daerah adalah : 1) Adanya keterpaduan antara elemen, masyarakat, legislatif dan eksekutif dalam memandang arti pentingnya partisipasi masyarakat di Kabupaten, 2) adanya sinkronisasi yang didasarkan atas kepentingan bersama untuk membangun daerah antara masyarakat dengan pemerintah (Lobis :1996).

Partisipasi masyarakat sering dihubungkan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan proses atau program pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Tetapi selama ini kebanyakan orang masih beranggapan bahwa partisipasi hanya ditunjukkan dengan tindakan fisik saja, padahal sebenarnya partisipasi juga mencakup sikap mental dan emosional.

Partisipasi berasal dari kata Inggris "to participate" yang berarti ikut serta, mengambil bagian atau terkadang diartikan juga sebagai berperan serta. Sastropoetro (1998) menggunakan pengertian partisipasi sebagai berikut :

Keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Selanjutnya dikemukakan bahwa dari pengertian tersebut dijumpai adanya tiga hal pokok yaitu :

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan lebih dari pada semata-mata atau hanya ketertiban secara jasmaniah
2. Unsur kedua, adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok
3. Partisipasi merupakan tanggung jawab terhadap kelompok

Davis (1997) menyatakan bahwa :

Participation is define as mental and emotional involvement of a person in a group situational which encourages him to contribute to goals and share responsibility in them " . Artinya partisipasi sebagai keterlibatan mental dan

emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorong untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya.

Sedangkan Alastaire White seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1998) mengemukakan pengertian partisipasi sebagai berikut :

Participation is involvement the local population actively in the decision making of development projects or in the implementation. (Partisipasi adalah keterlibatan penduduk setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan proyek atau pelaksanaannya.

Secara garis besar sifat partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi fisik dan partisipasi non-fisik. Partisipasi fisik lebih ditekankan pada sumbangan dalam bentuk tenaga, dimana kegiatannya dapat dilihat secara fisik dan hasilnya dapat dirasakan kemudian. Sementara itu partisipasi non fisik lebih ditekankan pada keaktifan dan keberanian berfikir, mengeluarkan pendapat gagasan atau saran dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Atas dasar itulah Simanjuntak (1996) membagi partisipasi kedalam lima jenis, yaitu:

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan seseorang dalam anjungsana, pertemuan dan rapat
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan dalam kegiatan pembangunan
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan dalam berbagai kegiatan perbaikan dan pembangunan desa
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan dalam mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan sebagai tanda kebersamaan

Kelima bentuk partisipasi tersebut merupakan bagian dari setiap pelaksanaan suatu program pembangunan yang dikenal dengan partisipasi berkelanjutan. Dari kelima bentuk partisipasi tersebut tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh masyarakat karena perbedaan tingkat pendidikan, pekerjaan, kedudukan sosial dan lain-lain yang dikenal dengan sebutan partisipasi parsial.

Sementara itu Koentjaraningrat yang dikutip oleh Priyatna (1996) mengemukakan dua tipe partisipasi sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus
2. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan

Dalam tipe partisipasi yang pertama, masyarakat diajak oleh pelaksana program agar ikut serta berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga dan harta bendanya untuk pelaksanaan program pembangunan yang biasanya bersifat fisik, misalnya proyek pelebaran dan pengerasan jalan kelurahan, pembuatan jembatan, proyek penghijauan da sebagainya. Dan dalam tipe yang kedua, partisipasi diberikan pada waktu pembangunan selesai dilaksanakan dan biasanya bukan merupakan dampak yang bersifat fisik tetapi bersifat non fisik. Partisipasi tipe ini lebih merupakan dampak dari program

pembangunan dimana masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dan hasil serta memelihara pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Selain itu, Cohen dan Uphoff dalam Syamsi (1996) mencatat adanya 9 tipe partisipasi yang mungkin saja terjadi dalam pembangunan daerah, yakni :

1. Partisipasi sukarela dengan inisiatif dari bawah,
2. Partisipasi dengan imbalan yang inisiatifnya dari bawah,
3. Partisipasi desakan atau paksaan (*enforced*), dengan inisiatif dari bawah,
4. Partisipasi Sukarela (*volunteered*) dengan inisiatif dari atas,
5. Partisipasi dengan imbalan (*rewarded*) dengan inisiatif dari atas,
6. Partisipasi paksaan, dengan inisiatif dari atas,
7. Partisipasi sukarela dengan inisiatif bersama (*through shared initiative*),
8. Partisipasi imbalan dengan inisiatif bersama, dan
9. Partisipasi paksaan dengan inisiatif bersama.

Arnstein (1969) dalam Horoeopetri dan Santosa (2007), menformulasikan peran serta masyarakat sebagai bentuk dari kekuatan rakyat (*citizen partisipation is citizen power*). Dimana terjadi pembagian kekuatan (power) yang memungkinkan masyarakat yang tidak mempunya (*the have-not citizens*) yang sekarang dikucilkan dari proses politik dan ekonomi untuk terlibat kelak. Singkat kata, peran serta masyarakat - menurut Arnstein - adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Lewat typologinya yang dikenal dengan Delapan Tangga Peran Serta Masyarakat (*Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation*), Arnstein menjabarkan peran serta masyarakat yang didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Arnstein juga menekankan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk peran serta yang bersifat upacara semu (*empty ritual*) dengan bentuk peran serta yang mempunyai kekuatan nyata (*real power*) yang diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif terhadap variabel mandiri yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif yakni pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada saat ini sebagaimana adanya dengan variabel mandiri atau tanpa menghubungkan dengan keterkaitan variabel lain. Penelitian ini dilaksanakan di 5 desa di Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing Desa Elat, Ngufit Bawah, Werka, Langgur dan Ohoidertawun yang merupakan percontohan pembangunan partisipasi masyarakat desa secara nasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terlibat secara langsung. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL

Dalam konsep partisipasi menurut Siagian (1972:108) dikatakan bahwa tahap partisipasi meliputi : partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan, dan partisipasi dalam evaluasi pembangunan. Pembahasan atas tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan program akan disajikan pada pembahasan berikut :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pengambilan Keputusan
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan
4. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi

Bentuk dan Model Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Pembangunan Partisipatif

Partisipasi masyarakat yang terserap dalam pelaksanaan proyek pelaksanaan pembangunan partisipatif berupa : uang, material/barang dan tenaga kerja. Hal tersebut dinyatakan oleh responden yaitu :

Antusias masyarakat sangat tinggi dalam merespon program ini. Semua desa/kelurahan melaksanakan kegiatan ini sesuai jadwal yang ditetapkan, dari segi pengerahan dana partisipasi masyarakat juga tinggi yang terlihat dari nilai bangunan fisik dibanding dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah.

Dari pendapat tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat ditumbuhkan sendiri oleh masyarakat dengan membentuk TPKD/K dengan Pemerintah Desa sebagai fasilitator. Melalui TPKD/K masyarakat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan di desanya secara bergotong royong dan swadaya. Swadaya masyarakat digali walaupun pada awalnya dipersyaratkan sebagai pendamping program, tetapi pada pelaksanaannya di semua desa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya juga telah mempunyai program pembangunan secara swadaya, sehingga adanya program Bantuan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif disinergikan dengan program yang ada di Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat mobilisasi (digerakkan) dengan adanya program stimulan dari Pemerintah, tetapi apabila dilihat bahwa proyek di desa merupakan sinergi program antara program yang sudah direncanakan dengan Program Bantuan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif, maka partisipasi masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi murni.

Faktor Penghambat dan Pendukung Program Bantuan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif.

Faktor Penghambat program bantuan pelaksanaan pembangunan Partisipatif Permasalahan/hambatan yang ditemui dalam proyek bantuan pelaksanaan pembangunan partisipatif Tahun 2019 di 5 desa di Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing Desa Elat, Ngufit Bawah, Werka, Langgur dan Ohoidertawun adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya waktu baik dalam tahapan persiapan maupun penyusunan program, sehingga ada beberapa Desa yang tidak membuat perencanaan yang baik .
2. Mekanisme penentuan besarnya bantuan yang diberikan kepada Desa/kelurahan hanya berdasarkan pada besarnya swadaya murni masyarakat yang tertuang dalam proposal yang diajukan oleh Desa/Kelurahan. Sehingga ada beberapa desa/kelurahan yang mengajukan proposal dengan swadaya murni masyarakat yang tinggi namun pada kenyataan swadaya tersebut fiktif dan mendapatkan bantuan yang besar.
3. Organisasi Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan yang terdiri dari anggota LKMD dan tokoh-tokoh masyarakat, sedangkan Kepala Desa dan Perangkat Desa hanya sebagai fasilitator, ternyata menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain : Tim maupun petugas Kecamatan sulit melakukan koordinasi langsung khususnya pada jam kerja karena anggota TPKD/K tidak berada ditempat.
4. Dalam penyusunan administrasi proyek beberapa TPKD/K belum dapat melaksanakan dengan baik karena mereka masih awam dengan administrasi proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Ada beberapa Kepala Desa yang belum siap menerima kondisi tersebut sehingga mereka cenderung bersikap apatis (kurang mendukung kegiatan).
6. Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) : Terdapat beberapa anggota BPD yang melaksanakan fungsi pengawasan lebih cenderung mengarah kepada kepentingan politis pribadi, sehingga menghambat proses pembangunan.

Faktor Pendukung Program Bantuan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif

Keberhasilan Program Bantuan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif, sebagai faktor pendukung program, dapat dinilai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua desa/kelurahan dilibatkan dalam program ini mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pengembangan pembangunan desa/kelurahan.
2. Prioritas kegiatan ditentukan sendiri oleh desa/kelurahan berdasarkan kesepakatan warga masyarakat di masing-masing desa/kelurahan.
3. Bantuan pelaksanaan pembangunan partisipatif diterima langsung oleh masyarakat melalui TPKD/K sesuai usulan yang disetujui oleh Tim Koordinasi Pembangunan Partisipatif tahun 2013.
4. Informasi tentang rencana dan pelaksanaan program dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkait.

Pembahasan

Berdasarkan pembahasan dan uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa program bantuan pelaksanaan pembangunan partisipatif dapat memacu partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan, sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sehingga Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dapat dikembangkan dengan program yang distimuli oleh Pemerintah Kota. Dari pembahasan dan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa dalam posisi Pemerintah sebagai stimulator pembangunan, maka masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam suatu program pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, sehingga program yang dilaksanakan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat sendiri Sehingga menimbulkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Kemasyarakatan yang berkesinambungan berdampak positif bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif, tidak hanya mengedepankan peran pemerintah dalam mengembangkan partisipasi masyarakat, tetapi juga dituntut peran aktif dari lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa. Lembaga kemasyarakatan di desa dapat dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa. Secara umum di semua desa penelitian (5desa) telah terbentuk LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), disamping banyak juga lembaga kemasyarakatan (dalam arti organisasi kemasyarakatan) yang ada di desa. Dari pembahasan diatas dapat dikemukakan bahwa adanya keterpaduan peran antara Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan partisipatif dimana terlihat keterlibatan multi stakeholders dalam program bantuan pembangunan partisipatif. Dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif, seluruh pihak berhak dan wajib berperan serta tidak hanya pada pelaksanaannya, tetapi juga mulai dari inisiatif/pemikiran awal, penelitian dan perencanaan, pengambilan keputusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian, termasuk menanggung akibat dari suatu pelaksanaan kebijakan bersama, baik positif maupun negatif.

Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat dengan melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan perkembangannya. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan karena masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku, adat istiadat serta kebiasaan di lingkungannya. Keterlibatan stakeholders menjadi syarat bagi pelaksanaan pembangunan partisipatif, karena dengan demikian akan dapat diserap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat, sehingga penetapan terhadap prioritas-prioritas pembangunan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa Peran aktif Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan, serta masyarakat akan menentukan keberhasilan program bantuan pembangunan partisipatif.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pilot Project Pembangunan Desa Partisipatif di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dikatakan tinggi dan bersifat dimobilisasi, walaupun terdapat juga di beberapa desa yang menunjukkan adanya partisipasi yang murni. Dalam kaitan posisi. Pemerintah sebagai stimulator pembangunan, maka masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam suatu program pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, sehingga program yang dilaksanakan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat sendiri. Adanya keterpaduan peran antara Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan partisipatif.

Berdasarkan kesimpulan maka disarankan bahwa kesiapan masyarakat dalam melaksanakan program Bantuan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif akan menentukan keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Dengan kata lain, adanya sinergi antara masyarakat, Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan akan menentukan keberhasilan program bantuan pembangunan partisipatif.

Daftar Pustaka

- Davis. 1997. *Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, Addison-Wesley
- Horoepoetri dan Santosa. 2007. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lobis, Solly. 1996. *Dimensi - Dimensi Manajemen Pembangunan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Muhi, Ali Hanafiah. 2011. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Alqaprint IPDN Jatinangor, Jatinangor.
- Priyatna. 1996. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rauf. 1993. *Manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sastropoetra, R.A. Santoso. 1998. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung.
- Siagian. 1972. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Simanjuntak, Pasaribu. 1996. *Sosiologi Pembangunan*. Universitas Kertanegara Press, Jakarta.
- Syamsi, Ibnu. 1996. *Memetri Desa dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat*. Mas Agung, Semarang.